BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara ontologis, fenomena demonstrasi merupakan manifestasi dari aksi kolektif (*collective action*) yang telah menjadi instrumen krusial dalam mekanisme perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) sejak era pencerahan di Eropa hingga merambah ke seluruh sistem demokrasi dunia (Sabrina, 2025). Di Indonesia, genealogi gerakan massa secara formal teridentifikasi sejak awal abad ke-20 sebagai respons terorganisir terhadap kolonialisme, yang kemudian terus bertransformasi menjadi kekuatan pendobrak sosiopolitik paling deterministik pada periode 1966 dan 1998. Demonstrasi dalam konteks ini tidak sekadar dipandang sebagai mobilisasi fisik di jalanan, melainkan sebagai sebuah "teater politik" yang kompleks di mana mahasiswa dan masyarakat sipil melakukan klaim atas hak-hak demokrasi dan kedaulatan mereka di ruang publik guna menantang status quo yang dianggap tidak lagi representatif terhadap kepentingan rakyat (Damantu & Arief, 2025).

Perkembangan paradigma demonstrasi dari dekade ke dekade menunjukkan pergeseran fundamental dari logika aksi kolektif tradisional menuju apa yang disebut oleh para sosiolog modern sebagai *logic of connective action* (Nugroho dkk., 2025). Jika pada era pra-digital mobilisasi massa sangat bergantung pada struktur hierarkis organisasi formal dengan jalur komunikasi yang bersifat *top-down* dan kaku, maka pada dekade 2020-an, gerakan massa telah bertransformasi menjadi fenomena yang bersifat *rhizomatic*, cair, dan desentralistik (Musyrifah & Edtiyarsih, 2025).

Eskalasi gerakan kontemporer tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya logistik fisik atau instruksi komando tunggal, melainkan lebih ditentukan oleh kecepatan sirkulasi informasi digital, kekuatan narasi yang dibangun di jagat maya, serta resonansi emosional kolektif yang mampu menyatukan individu-individu dari berbagai latar belakang tanpa sekat organisasi yang membatasi (Sosebi, 2025). Korelasi linear antara dinamika sosiopolitik dan akselerasi teknologi informasi telah menciptakan sebuah ekosistem protes hibrida yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia.

Konvergensi ini memungkinkan terjadinya sinkronisasi instan antara ketidakpuasan di ranah privat dengan mobilisasi massal di ranah publik, di mana jarak geografis dan hambatan birokrasi dalam konsolidasi massa telah direduksi secara signifikan oleh efisiensi transmisi data nirkabel (Layyina & Ummah, 2025). Menurut penelitian Saadah (2024), dalam konteks masyarakat urban kontemporer, proses *political opportunity structure* dapat terbuka kapan saja ketika sebuah kebijakan otoritas berbenturan dengan aspirasi publik yang teramplifikasi di internet, sehingga menciptakan gelombang tekanan politik yang sulit diredam oleh mekanisme represif konvensional sekalipun.

Dalam lanskap komunikasi global yang semakin terintegrasi, media sosial telah berevolusi dari sekadar platform interaksi interpersonal menjadi infrastruktur politik yang vital bagi diseminasi informasi publik secara masif. Melalui mekanisme *citizen journalism* yang inklusif, media sosial memiliki kemampuan untuk mendobrak hegemoni narasi media arus utama yang seringkali terkungkung oleh kepentingan elit atau sensor kekuasaan (Abdullah dkk., 2025). Informasi mengenai ketimpangan fiskal, penyelewengan regulasi daerah, maupun

maladministrasi pemerintahan dapat tersebar secara viral dalam hitungan detik, menciptakan fenomena *information cascade* yang kuat (Damantu & Arief, 2025). Hal ini pada gilirannya memicu terbangunnya kesadaran kolektif yang menjadi bahan bakar utama bagi gerakan massa untuk menuntut perubahan secara langsung dan transparan. Fenomena mobilisasi digital ini selaras secara teoretis dengan konsep *Digital Public Sphere* atau Ruang Publik Digital yang merupakan revitalisasi dari pemikiran Jürgen Habermas dalam konteks masyarakat informasi (Ismail & Prananda, 2025).

Di Kota Lhokseumawe, media sosial TikTok berperan sebagai arena *discursive democracy* utama tempat Aliansi Mahasiswa Malikussaleh dapat membentuk opini publik dan menggalang solidaritas otonom sebelum melakukan okupasi fisik terhadap ruang-ruang strategis di pusat kota (Abdullah dkk., 2025). Memasuki tahun 2025, Kota Lhokseumawe menyaksikan gelombang protes yang sangat masif yang dikoordinasikan secara terstruktur oleh Aliansi Mahasiswa Malikussaleh di bawah pimpinan Muhammad Ilal Sinaga sebagai motor penggerak utama. Gerakan massa menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini menggunakan infrastruktur digital TikTok secara radikal untuk mengonsolidasikan ketidakpuasan publik dari ruang siber menuju tindakan nyata di lapangan.

Gelombang penolakan ini meledak akibat kebijakan otoritas fiskal daerah yang menetapkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara drastis, berimplikasi pada lonjakan tagihan PBB yang melambung hingga 280 persen dari tarif tahun sebelumnya (IKPI, 2025). Kebijakan penyesuaian tarif ini dinilai tidak realistis serta sangat memberatkan kondisi ekonomi masyarakat bawah dan pelaku

usaha lokal yang tengah menghadapi stagnasi ekonomi sepanjang tahun 2025. Mahasiswa menilai penarikan pajak yang agresif ini mencederai keadilan sosial dan bertolak belakang dengan minimnya peningkatan penyediaan infrastruktur serta pelayanan publik daerah yang masih dipenuhi rapor merah.

Urgensi yang mendasari gerakan masif ini terletak pada keberhasilan Aliansi Mahasiswa Malikussaleh dalam memetakan kerja diskursif dan mentransformasikan isu PBB yang semula kaku dan teknis melalui platform TikTok. Para aktivis mahasiswa taktis mengemas informasi ketimpangan ekonomi ke dalam video pendek kreatif, infografis teatrikal, komparasi visual tagihan PBB, hingga video sindiran komedi kebijakan daerah. Konten TikTok ini diproduksi secara masif bersama penyebaran panduan persiapan massa (*starter pack*), poster tuntutan digital, dan rute titik kumpul.

Arsitektur algoritma TikTok dan muatan emosional konten tersebut terbukti menurunkan hambatan psikologis, memangkas biaya koordinasi gerakan, serta bertindak sebagai alat pembebasan kognitif (*cognitive liberation*) yang sukses menggerakkan massa aksi lintas fakultas dalam jumlah besar. Akumulasi kekesalan warga di ranah virtual tersebut berhasil dikonversi secara nyata menjadi aksi pendudukan fisik di pelataran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe. Desakan horizontal hibrida yang viral dengan tagar #LhokseumaweTolakKenaikanPBB ini pada akhirnya mereduksi hambatan birokrasi, memaksa Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, bersama Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal, untuk menandatangani petisi terbuka peninjauan regulasi secara *real-time*.

Fenomena empiris ini menjadikan Aliansi Mahasiswa Malikussaleh sebagai subjek riset yang ideal untuk meneliti efektivitas pemanfaatan ruang publik digital di era kontemporer, yang dituangkan dalam judul: **"Peran Tik-Tok Dalam Mobilisasi Demo Menolak Kenaikan Pajak PBB Tahun 2025 (Studi Kasus: Aliansi Mahasiswa Malikussaleh)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola penggunaan media sosial Tik-Tok (karakteristik konten, narasi visual, dan pemanfaatan algoritma) dalam proses mobilisasi massa menolak kenaikan pajak PBB tahun 2025 di Kota Lhokseumawe?
2. Apa hambatan dan efektivitas ruang publik digital di TikTok dalam mengonversi mosi tidak percaya digital masyarakat menjadi mobilisasi massa nyata di Gedung DPRK Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai pemanfaatan platform TikTok sebagai infrastruktur politik utama dalam menggerakkan massa pada peristiwa demonstrasi menolak kenaikan pajak PBB di Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 oleh Aliansi Mahasiswa Malikussaleh. Pembatasan fokus dialangkan pada pengkajian hulu mengenai strategi pengemasan konten visual kreatif (infografis, video sindiran kebijakan, dan panduan starter pack) untuk membangun kesadaran kolektif, serta pengkajian hilir mengenai efektivitas konversi solidaritas siber menjadi aksi pendudukan fisik di pelataran Gedung DPRK Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pola pemanfaatan arsitektur konten TikTok oleh aliansi mahasiswa dalam mendiseminasikan isu penolakan pajak PBB tahun 2025 di Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui dan menguraikan mekanisme konversi mosi tidak percaya digital di TikTok menjadi mobilisasi massa nyata di Gedung DPRK Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu Sosiologi Politik dan Komunikasi Digital, khususnya dalam memperdalam literatur mengenai penerapan Teori Digital Public Sphere pada dinamika politik lokal di Aceh.

1.5.1 Manfaat Akademis

Adapun manfaat yang diharapkan secara akademis yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Politik: Memberikan sumbangsih teoretis bagi perkembangan Sosiologi Politik dan Komunikasi Politik, khususnya dalam merevitalisasi konsep *Digital Public Sphere* Jürgen Habermas dan *Connective Action* Bennett-Segerberg pada dinamika politik lokal di Aceh.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya**:** Menjadi referensi ilmiah primer dan data komparatif bagi sivitas akademika Universitas Malikussaleh maupun

peneliti luar yang berfokus pada gerakan sosial berbasis siber dan dinamika kebijakan fiskal daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang diharapkan secara praktis yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa dan Aktivis Sipil (Aktor Gerakan)**:** Sebagai bahan evaluasi strategis mengenai cara mengemas isu kebijakan publik secara presisi, edukatif, dan terukur di ruang digital demi meraih legitimasi intelektual.
2. Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe (Pengambil Kebijakan): Sebagai instrumen referensi praktis bagi Wali Kota, BPKD, dan DPRK Lhokseumawe untuk melihat urgensi *social listening* di media sosial sebagai indikator aspirasi publik yang *real-time* sebelum mengesahkan regulasi yang sensitif.